



KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

KEBIJAKAN DID 2021



INDIKATOR DID 2020 – DID 2021



Dana Insentif Daerah (DID) dialokasikan untuk memberikan **insentif/penghargaan** kepada daerah **atas kinerja pemerintah daerah dalam perbaikan/pencapaian kinerja** di bidang **tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat**

Kriteria Utama

2020

- Opini BPK atas LKPD (WTP)
- Penetapan Perda APBD tepat waktu
- Penggunaan e-Government (*e-budgeting* dan *e-procurement*)

Kategori Kinerja

- Kesehatan Fiskal dan pengelolaan keuangan Daerah**
 - Kemandirian Daerah
 - Efektifitas Pengelolaan Belanja Daerah
 - Creative Financing
 - Mandatory spending
 - Ketepatan waktu pelaporan
- Pelayanan Dasar Publik Bidang Pendidikan**
 - Angka Partisipasi Murni
 - Peta Mutu Pendidikan
 - Rata-rata Nilai Ujian Nasional
- Pelayanan Dasar Publik Bidang Kesehatan**
 - Penanganan *Stunting* (*Baduta*)
 - Baduta yang mendapatkan imunisasi lengkap
 - Persalinan di fasilitas kesehatan
- Pelayanan Dasar Publik Bidang Infrastruktur**
 - Akses sanitasi Layak
 - Sumber air minum layak
- Kesejahteraan Masyarakat**
 - Penurunan Penduduk Miskin
 - Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
- Pelayanan Umum Pemerintahan**
 - Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
 - Perencanaan Pembangunan Daerah
 - Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
 - Inovasi Pemerintah Daerah
- Peningkatan ekspor
- Peningkatan Investasi
- Pengelolaan Sampah plastik

Kriteria Utama

2021

- Opini BPK atas LKPD (WTP)
- Penetapan Perda APBD tepat waktu
- Penggunaan e-Government (*e-budgeting* dan *e-procurement*)

Kategori Kinerja

- Kesehatan Fiskal dan pengelolaan keuangan Daerah**
 - Kemandirian Daerah
 - Efektifitas Pengelolaan Belanja Daerah
 - Sistem Informasi Keuangan Daerah (baru)**
- Pelayanan Dasar Publik Bidang Pendidikan**
 - Angka Partisipasi Murni
 - Peta Mutu Pendidikan
- Pelayanan Dasar Publik Bidang Kesehatan**
 - Penanganan *Stunting* (*Balita*)
 - Balita yang mendapatkan imunisasi lengkap
 - Persalinan di fasilitas kesehatan
- Pelayanan Dasar Publik Bidang Infrastruktur**
 - Akses sanitasi Layak
 - Sumber air minum layak
- Kesejahteraan Masyarakat**
 - Penurunan Penduduk Miskin
 - Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
 - Penurunan Angka Pengangguran (baru)**
- Pelayanan Umum Pemerintahan**
 - Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
 - Penghargaan Pembangunan Daerah
 - Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
 - Inovasi Daerah
- Peningkatan ekspor
- Peningkatan Investasi
- Pengelolaan Sampah
- Pengendalian Inflasi Daerah (baru)**
- Indeks Pencegahan Korupsi (baru)**

SUMBER DATA PERHITUNGAN DID 2021



No	Jenis Data Kriteria Utama	Tahun	Sumber Data
1	Opini BPK atas LKPD	2019	BPK
2	Penetapan Perda APBD	2020	PEMDA
3	<i>e-budgeting</i>	2020	KEMENDAGRI
4	<i>e-procurement</i>	2019	LKPP

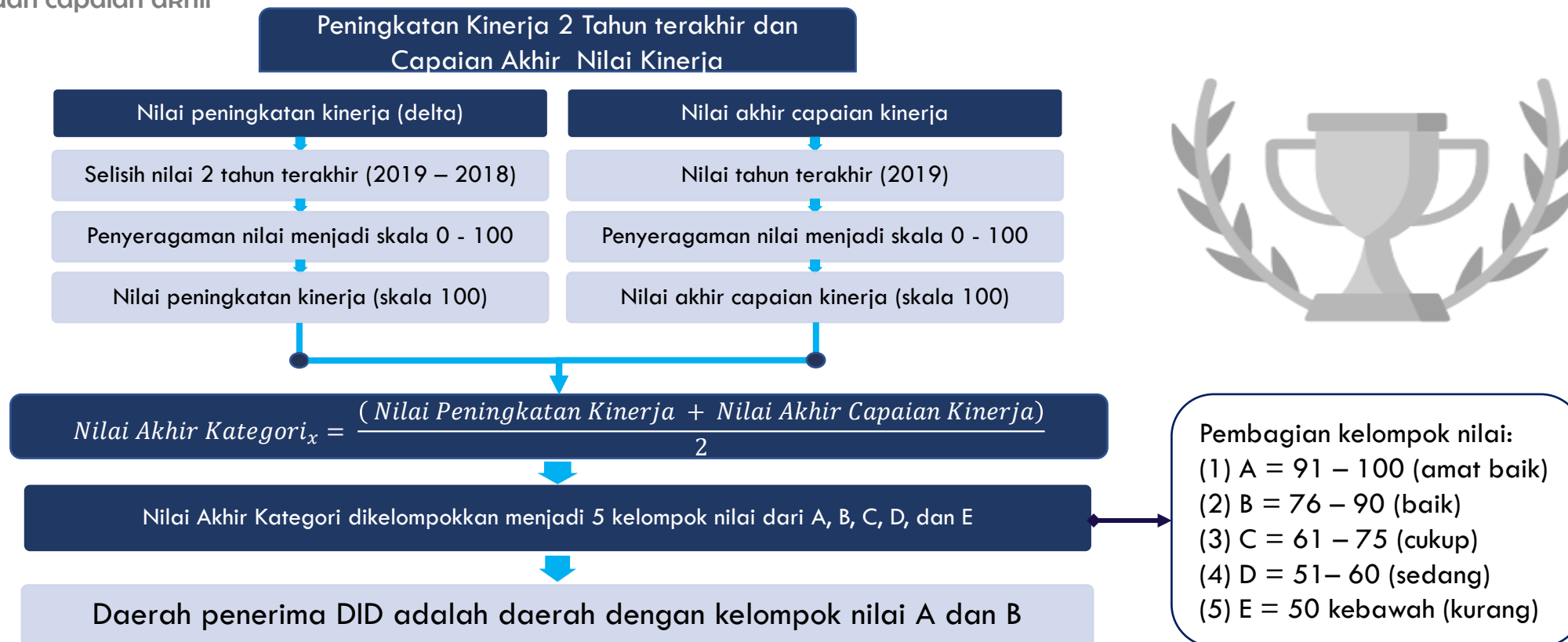
No	Jenis Data Kategori Kinerja	Tahun	Sumber Data
I. Kategori Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah			
1	APBD (Anggaran)	2018-2019	PEMDA
2	Realisasi APBD	2018-2019	PEMDA
3	PDRB Non Migas	2018-2019	BPS
4	SIKD	2020	KEMENKEU
II. Kategori Pelayanan Dasar Publik Bidang Pendidikan			
1	Peta Mutu Pendidikan	2018-2019	KEMENDIKBUD
2	Angka Partisipasi Murni	2018-2019	BPS
III. Kategori Pelayanan Dasar Publik Bidang Kesehatan			
1	Persentase Balita Stunting	2018-2019	KEMENKES
2	Persentase Balita Sudah Mendapatkan Imunisasi Lengkap	2018-2019	KEMENKES
3	Persentase Cakupan Persalinan dengan Tenaga Kesehatan	2018-2019	BPS
IV. Kategori Pelayanan Dasar Publik Bidang Infrastruktur			
1	Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Layak	2018-2019	BPS
2	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak	2018-2019	BPS

No	Jenis Data Kategori Kinerja	Tahun	Sumber Data
V. Kategori Kesejahteraan Masyarakat			
1	Persentase Penduduk Miskin	2018-2019	BPS
2	Indeks Pembangunan Manusia	2018-2019	BPS
3	Penurunan Angka Pengangguran	2018-2019	BPS
VI. Pelayanan Umum Pemerintahan			
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	2018-2019	KEMENDAGRI
2	Penghargaan Pembangunan Daerah	2020	BAPPENAS
3	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	2018-2019	KEMENPANRB
4	Inovasi Daerah	2020	KEMENPANRB/ KEMENDAGRI
VII. Peningkatan Ekspor		2018-2019	KEMENKEU
VIII. Peningkatan Investasi		2018-2019	BKPM
IX. Kategori Pengelolaan Sampah		2020	KLHK
X. TPID Award		2020	MENKO PEREKONOMIAN
XI. Indeks Pencegahan Korupsi		2018-2019	KPK

METODOLOGI PERHITUNGAN DID 2021



- I. Kategori Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah, Pelayanan Dasar Publik, Kesejahteraan Masyarakat, Peningkatan Investasi, Peningkatan Ekspor, Penyelenggaraan Pemerintahan, SAKIP, dan Indeks Pencegahan Korupsi didasarkan pada nilai peningkatan kinerja dan capaian akhir



- II. Kategori Penghargaan Pembangunan Daerah, Inovasi Daerah, TPID Award, dan Pengelolaan Sampah didasarkan pada hasil penilaian oleh Kementerian/Lembaga dan/atau Instansi yang terkait

INDIKATOR INDEKS PENCEGAHAN KORUPSI (KPK)



Dalam rangka pembenahan tata kelola Pemda secara komprehensif, KPK fokus melakukan koordinasi pencegahan korupsi terintegrasi melalui *Monitoring Centre for Prevention* (MCP) yang memberikan informasi capaian kinerja program koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi yang dilaksanakan oleh seluruh pemerintah daerah meliputi 8 area intervensi. Setiap area intervensi memiliki indikator dan sub indikator rinci pada masing-masing Pemda yang dapat dilihat pada menu Jendela Daerah melalui website JAGA.ID. Cakupan 8 area intervensi tersebut meliputi:



- | | |
|--|-------------------------------------|
| 1) Perencanaan dan Penganggaran APBD; | 5) Manajemen ASN; |
| 2) Pengadaan Barang dan Jasa; | 6) Optimalisasi Pajak Daerah; |
| 3) Perizinan Terpadu Satu Pintu; | 7) Pengelolaan Barang Milik Daerah; |
| 4) Penguatan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP); | dan |
| | 8) Tata Kelola Dana Desa. |



➤ *Monitoring Centre for Prevention* (MCP) :

- Data diperoleh melalui proses *Self Assesment* berdasarkan 8 area intervensi (berdasarkan sub-komponen di masing-masing area intervensi) berbentuk nilai persentase;
- Verifikasi data dilakukan oleh unit Korsupga KPK;
- Data dari 8 area intervensi tersebut kemudian dikalikan dengan masing-masing bobot dan diakumulasi menjadi nilai Progres Renaksi Korsupgah; dan
- Data yang digunakan merupakan data 2 tahun terakhir (2018-2019).

DAERAH PENERIMA DID

KATEGORI INDEKS PENCEGAHAN KORUPSI



Usulan: 132 Daerah (18 Provinsi, 34 Kota, dan 80 Kabupaten)

Pemenang: 34 Daerah (6 Provinsi, 8 Kota, dan 20 Kabupaten)

No	Nama Daerah	Alokasi (M)
1	Provinsi Riau	9.62
2	Provinsi Jawa Barat	8.55
3	Provinsi DI Yogyakarta	9.62
4	Provinsi Kalimantan Tengah	8.55
5	Provinsi Kalimantan Utara	9.09
6	Provinsi Sulawesi Selatan	8.55
7	Kota Bukit Tinggi	9.62
8	Kota Prabumulih	8.55
9	Kota Bandar Lampung	8.55
10	Kota Bandung	9.09
11	Kota Tangerang	8.55
12	Kota Tangerang Selatan	10.15
13	Kota Semarang	10.15
14	Kota Madiun	8.55
15	Kab. Humbang Hasundutan	9.62
16	Kab. Batang Hari	9.62
17	Kab. Musi Banyuasin	10.69

No	Nama Daerah	Alokasi (M)
18	Kab. Musi Rawas	10.69
19	Kab. Tulang Bawang	8.55
20	Kab. Bogor	8.55
21	Kab. Garut	8.55
22	Kab. Tangerang	10.15
23	Kab. Batang	9.09
24	Kab. Demak	9.62
25	Kab. Tegal	9.09
26	Kab. Lumajang	9.09
27	Kab. Mojokerto	10.15
28	Kab. Nganjuk	9.62
29	Kab. Ngawi	9.62
30	Kab. Sampang	10.15
31	Kab. Penajam Paser Utara	8.55
32	Kab. Minahasa Tenggara	9.62
33	Kab. Banggai	9.62
34	Kab. Badung	9.09



TERIMA KASIH



@DitjenPK



**direktorat jenderal
perimbangan keuangan**



ditjenpk



1500420

Whatsapp 085214087800